

MEMBANGUN *LINK AND MATCH* PENDIDIKAN INDONESIA^{*}

Asnita Frida Sebayang^{}**

Abstrak

Pembangunan Gedung Sekolah di negara-negara yang belum berkembang masih merupakan program utama pemerintah. Pendidikan adalah unsur penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai masukan (input) di dalam suatu proses produksi. Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah produktivitas, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pada kenyataannya di Indonesia, perkembangan pendidikan masih menghadapi banyak masalah, seperti perkembangan sistem pendidikan yang menyerap tenaga kerja dalam masyarakat. Keterkaitan antara jumlah tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja masih belum terbentuk dengan baik. Buruknya struktur perkembangan “human kapital” akan mempengaruhi sisi lain dari ekonomi (misalnya : gaji). Hal ini diperburuk dengan adanya ketidakmerataan perkembangan pendidikan.

Perkembangan pendidikan harus mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran intelektual. Pendidikan yang baik harus menciptakan pendapatan yang baik dan memberikan peluang pekerjaan, atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini akan memberikan dampak positif untuk masyarakat dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pendidikan, Perkembangan, Keterkaitan, Pertumbuhan

1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan Indonesia mengalami fase penting pada tahun 1970-an dan 1980-an. Saat itu pemerintah gencar mengadakan

* Naskah Juara Harapan II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LTKI) Dosen Unisba TA. 2005/2006

** **Asnita Frida Sebayang, SE., M.Si.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba

ekspansi program konstruksi sekolah. Pencanangan program wajib belajar semakin memperkuat eksistensi pentingnya pendidikan bagi penduduk Indonesia. Banyak sekolah INPRES yang didirikan dengan segala kelebihan dan kelebihannya.

Pembangunan institusi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan manusia sebagai *human capital* yang memegang peranan kunci dalam proses produksi. Proses produksi tidak akan berjalan tanpa *input* tenaga kerja. Terdapat dua *input* penting dalam proses produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Dua jenis *input* ini merupakan *input* yang harus ada setiap pembahasan teori produksi dalam ekonomi. Produktivitas mereka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin optimal fungsi mereka maka akan meningkatkan produktivitas yang selanjutnya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan *human capital* Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terlepas dari masalah pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan kesinambungan dalam perencanaannya. Kesalahan dalam mengidentifikasi dari aspek pendidikan akan berdampak pada jangka panjang dan bisa lintas generasi karena membangun sistem pendidikan sama halnya membangun karakter bangsa. Salah satu indikator pendidikan yang baik adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tidak saja mampu meningkatkan pendapatan individu tetapi juga meningkatkan perekonomian. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pendidikan yang mampu mengantarkan siswa/mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja. Komponen pendidikan sangat penting, karena jumlah penduduk yang terdaftar di sekolah tumbuh 18,54% pada periode 2001-2005 kemudian diiringi dengan pertumbuhan pencari kerja sebesar lebih dari 30% pada periode yang sama. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kegiatan bisa dilihat pada tabel di halaman berikut.

Komposisi penduduk seperti yang tampak pada tabel 1 memberi konsekuensi tanggung jawab pada masa yang akan datang untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai karena didominasi oleh pertumbuhan penduduk yang mencari kerja dan sekolah. Jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan sektor riil, beban perekonomian akan semakin besar karena produktivitas yang rendah.

Tabel 1
Penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2001 dan 2005

No.	Jenis Kegiatan	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2001	2005	
1	Penduduk usia 15+	144,033,873	155,549,736	8.00
2	Tanaga Kerja	98,812,448	105,802,372	7.07
	Tingkat partisipasi tenaga kerja	(68.60)	-68.02	
	Bekerja	90,807,417	94,948,118	4.56
	Mencari pekerjaan	8,005,031	10,854,254	35.59
	Tingkat Pengangguran	(8.10)	-10.26	
3	Tidak termasuk tenaga kerja	45,221,425	49,747,364	10.01
	Sekolah	10,899,236	12,919,459	18.54
	Pekerja Rumah Tangga	26,461,653	29,245,039	10.52
	Lainnya	7,860,536	7,582,866	(3.53)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

2. Rumusan Masalah

Pembangunan kuantitas pada sektor pendidikan menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Hanya saja, kenaikan pada pencapaian pendidikan belum dibarengi dengan kualitas sehingga tidak terjadi *link and match* antara tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Untuk itu perlu

diidentifikasi keadaan pendidikan kita, ketimpangan serta kaitannya dengan lapangan kerja yang ada sehingga pembangunan pendidikan menjadi lebih terarah.

3.Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki beberapa tujuan yakni;

1. Mengidentifikasi keadaan SDM di Indonesia sebagai *Human Capital*
2. Mengidentifikasi permintaan dan penawaran *Human Capital* (SDM) di Indonesia
3. Mengidentifikasi ada/tidak *link and match* pembangunan pendidikan dengan lapangan pekerjaan
4. Mengidentifikasi ketimpangan pembangunan pendidikan di Indonesia

4. Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada;

1. Pengambil kebijakan di sektor pendidikan sehingga pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan *link and match* antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan
2. Penelitian-penelitian lebih lanjut yang memperdalam kajian peningkatan kualitas *Human Capital* di Indonesia

5. Tinjauan Pustaka

5.1Invetasi Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Sejak tahun 1960-an, para ekonom mulai mengembangkan investasi pada sumber daya manusia (*human capital*). Investasi pada SDM dilakukan setara dengan investasi fisik. Investasi SDM dapat diartikan sebagai kegiatan dengan menggunakan sumber daya saat ini untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa yang akan datang. Komponen utama yang dibangun pada SDM ini adalah pengetahuan. Dengan begitu, pengetahuan manusia dapat digunakan secara efektif. Investasi SDM tidak terbatas pada peningkatan pengetahuan melalui pendidikan formal (sekolah) namun juga melalui pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan, kesehatan, serta

kapasitas lain dari sisi SDM. Perhatian pada kesehatan dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja karena stamina yang baik. Indikator keberhasilan investasi SDM ini relatif sulit diukur karena hasilnya bersifat kualitatif. Keseriusan suatu negara memperhatikan pendidikan dan kesehatan biasanya dilihat dari lama bersekolah penduduknya dan tingkat harapan hidup. Saat ini mulai dikembangkan indikator lain seperti kualitas mengajar, fasilitas, dan kurikulum. Indikator-indikator ini dinilai memberi dampak signifikan pada produktivitas tenaga kerja dan selanjutnya mempengaruhi tingkat upah yang diterima dan kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perhatian pada pentingnya peranan manusia pada pertumbuhan ekonomi kemudian diwujudkan pada akhir tahun 80-an. Saat itu para ekonom mulai mempertanyakan sejumlah asumsi ada teori pertumbuhan neoklasik. Asumsi-asumsi itu antara lain; *constant return to scale* (CRTS) dan konsep *diminishing return* pada kegiatan produksi. Asumsi-asumsi berlakunya pertumbuhan tersebut tidak dapat diterima karena mengabaikan faktor pembangunan kapital sumber daya manusia yang merupakan komponen legiatan produksi. Pendekatan yang menekankan pentingnya investasi SDM ini kemudian disebut sebagai teori *endogenous growth*. SDM dinilai teori ini sebagai akumulasi kapital. Peningkatan pendidikan SDM diduga akan memperbaiki kualitas SDM yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas. Pada akhirnya proses produksi akan menghasilkan *increasing return* (hasil yang semakin meningkat).

Todaro dan Smith (2003:369) dalam bukunya *Economic Development* menyebutkan bahwa investasi SDM dan kesehatan adalah satu kesatuan. *Human capital* diartikan sebagai pendidikan, kesehatan, dan kapasitas kapasitas yang melekat pada manusia. Jika faktor-faktor tersebut mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Status kesehatan berpengaruh pada pendidikan. Di negara-negara maju menunjukkan bahwa keadaan nutrisi yang baik melalui program pemberian suplemen pada anak memperpanjang waku tempuh (lama) kelulusan sekolah. Ketidakefektifan proses belajar bisa disebabkan oleh keadaan kesehatan yang buruk. Pada kasus negara berkembang banyak ditemui anak-anak bertubuh kerdil karena kondisi gizi buruk. Imbasnya, kemampuan menyerap pelajaran juga tidak baik. Individu yang berpendidikan baik tidak hanya memberi manfaat yang baik bagi dirinya sendiri, namun juga pada lingkungannya. Penduduk yang berpendidikan bisa memberi inovasi bagi masyarakat disekitarnya.

Investasi SDM di negara berkembang tampaknya substansial. Kasus di Venezuela (Todaro, 2003) menunjukkan bahwa tingkat upah sejalan dengan tingkat pendidikan dimana penerima gaji tertinggi adalah kelompok yang menyelesaikan pendidikan di universitas. Ditinjau dari distribusi pendidikan, penduduk negara maju cenderung bisa mengakses pendidikan sementara di negara berkembang terjadi kesenjangan pendidikan pada si kaya dan si miskin. Penduduk miskin sedikit saja yang bisa menikmati pendidikan yang baik. Bahkan terjadi eksplorasi anak (usia sekolah) yang masuk ke pasar tenaga kerja untuk membantu keuangan keluarga.

Pembangunan pendidikan bisa dilihat dari anggaran pemerintah untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan di negara maju cenderung lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Padahal, menurut pandangan teori *endogenous growth*, perhatian pada pendidikan diduga akan memutus rantai kemiskinan. Pada akhirnya, kurangnya akses pendidikan menjadikan rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan (bahkan cenderung mengalami penurunan) yang kemudian tidak bisa memutus lingkaran kemiskinan yang telah ada. Bahkan bisa memunculkan kemiskinan baru.

5.2. Penawaran dan Permintaan Pendidikan

Kemampuan sekolah menyerap individu banyak dipengaruhi faktor non pasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kasus negara berkembang, perhatian terhadap permintaan sekolah (pendidikan) seringkali didahului karena sekolah didirikan oleh pemerintah. Pada sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh yakni; (1) Ekspektasi peningkatan penerimaan setelah melalui jenjang pendidikan yang tinggi dan (2) biaya pendidikan.

5.2.1. Penawaran *Entrepreneurship*

Dalam bukunya, Meier (2000:273) mengutip ide Harvey Leibenstein yang dipaparkan dalam tulisan di *Jurnal American Economic Review* mengungkapkan peranan *entrepreneurship* dalam pembangunan. Di situ dijelaskan bahwa terdapat dua jenis *entrepreneurship* yakni *entrepreneurship* rutin dan *Shumpeterian entrepreneurship* (disebut dengan N-*Entrepreneurship*). Jenis pertama adalah *entrepreneurship* beraktivitas dengan melibatkan manajemen yakni dengan melakukan koordinasi,

berkonsentrasi pada proses produksi dengan pola kerja yang sudah terbangun pada pasar tertentu. Jenis kedua, memerlukan kreativitas karena pasar dan sistem produksi yang belum sepenuhnya terbangun. Jika *N-entrepreneur* ini sukses maka ia harus mengisi defisiensi pada pasar yang ada.

Keberadaan SDM tidak dapat dipisahkan dari fungsi produksi. Pada pembahasan fungsi produksi dibicarakan bagaimana mengoptimalkan *input* (salah satunya SDM) meskipun tidak dibahas aktualisasinya sehingga *entrepreneur* bisa memperbaiki defisiensi misalnya dalam memproduksi komoditas tertentu yakni mesin. Jika sebuah negara memproduksi mesin itu dan untuk melakukan impor terdapat hambatan maka hanya *entrepreneur* yang memiliki akses informasi tentang bagaimana menciptakan mesin yang dapat digunakan untuk industri. *Entrepreneur* potensial kemudian bisa mengatasi defisiensi pasar.

Kasus yang lain, suatu jenis output tidak bisa dipasarkan dengan baik oleh manajemen. Peranan *entrepreneur* kemudian menjadi penting untuk memperoleh pasar. Seorang *entrepreneur* harus memiliki kapasitas mengoperasikan aktivitas ekonomi disekitarnya dengan mencari kesempatan-kesempatan ekonomi.

Patrinos dan Sakellariou (2004) melakukan penelitian di Venezuela tentang pengaruh kebijakan terhadap pendidikan dan pasar tenaga kerja. Isu pendidikan dasar gratis di sana telah dilakukan sejak perjuangan kemerdekaan. Pada awalnya, sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem Perancis dengan kebijakan pendidikan yang tersentralisasi dan kurikulum yang kaku. Keinginan untuk menggratiskan pendidikan dasar baru terjadi pada 1870-an dimana pendidikan elementer ditetapkan menjadi tanggungjawab nasional, *state* dan pemerintahan lokal. Kebijakan ini menghasilkan negara Venezuela menjadi negara yang paling rendah tingkat buta hurufnya di negara-negara Amerika Latin. Pada tahun 1985, penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bisa baca tulis mencapai 88 persen. Peningkatan jumlah lulusan sekolah secara dramatis terjadi pada tahun 1970 an dan 1980 an. Bahkan untuk pendidikan tinggi (hampir 60 persen penduduk). Ini juga ditandai dengan pertumbuhan pesat sekolah-sekolah baru. Patrinos dan Sakellariou (2004) menggunakan data *cross section* dengan teknik regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan 2000 sampel. Temuan itu menyimpulkan, adanya intervensi pada sisi penawaran berpengaruh pada pendidikan di Venezuela dan mampu membuat perubahan signifikan pada keputusan sekolah. Adanya kebijakan pemerintah dan

turunnya biaya pendidikan tampaknya lebih berpengaruh dibandingkan dengan keberadaan variabel-variabel lain.

Mereka juga memasukkan beberapa karakteristik analisis termasuk perbedaan gender untuk melihat ada atau tidak masalah bias gender. Temuannya menunjukkan bahwa keputusan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dipengaruhi oleh keadaan pendidikan orang tua. Keadaan pendidikan orangtua yang lebih tinggi, maka anggaran pendidikan untuk anak akan relatif tinggi pula.

Studi yang dilakukan oleh Filmer (2004) di 21 negara miskin menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kelulusan sekolah dasar dan menengah. Filmer dalam modelnya menggunakan variabel gender pelajar (laki-laki dan perempuan), kesejahteraan rumah tangga (indikatornya kepemilikan aset keluarga dan karakteristik tempat tinggal) dan tingkat kluster (dilihat dari jarak antara sekolah dan tempat tinggal). Temuannya menunjukkan faktor jarak ke sekolah menjadi penentu kelulusan, sehingga penyediaan sekolah hendaknya memperhatikan jarak-jarak rata-rata sekolah dengan tempat tinggal. Sebaiknya, sekolah mudah dicapai.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Duraisamy et.al. (1997) di India untuk melihat apakah ada *trade-off* antara kuantitas dan kualitas pada saat terjadi peningkatan pendaftaran ke sekolah. Ketika pemerintah Tamil Nadu membuat program yang membuat peningkatan minat masyarakat ke sekolah, terjadi lonjakan pendaftaran secara dramatis. Akibatnya, di banyak tempat rasio guru-siswa menjadi sangat besar sehingga proses belajar-mengajar menjadi tidak efektif. Bahkan banyak proses belajar menjadi tidak seiring dengan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, berpengaruh pada penurunan tingkat kelulusan siswa. Temuan studi ini menunjukkan, pendidikan yang dikelola swasta cenderung mencapai kinerja yang baik.

Beberapa penelitian terkait memasukkan indikator kualitas sekolah sebagai penentu tingkat kelulusan. Indikator-indikator kualitas tersebut antara lain; nilai yang dicapai oleh siswa ketika menyelesaikan pendidikan, kualitas pelajaran matematika, kualitas lingkungan fisik (termasuk staf), peningkatan alokasi dana pengeluaran untuk fisik sekolah, kualifikasi pengajar dan perilakunya.

6. Pembangunan Pendidikan Indonesia

6.1 Masalah Ketimpangan

Pendidikan Indonesia dihadapkan pada masalah ketimpangan. Di sisi lain, pemerintah juga masih dihadapkan pada masalah keadilan dalam menyediakan pendidikan berkualitas di Indonesia. Fenomena di perkotaan yang kita lihat, masyarakat lebih bebas memilih pendidikan dan bisa disesuaikan dengan ketersediaan dana meskipun ada kecenderungan biaya pendidikan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Ketimpangan pendidikan bisa diukur dengan indeks gini. Komponen yang dimasukkan dalam perhitungan adalah; bagian dari total penduduk berdasarkan lamanya pendidikan, rata-rata menempuh pendidikan (desa-kota, laki-laki vs perempuan). Perhitungan yang dilakukan oleh *World Bank* juga menggunakan indeks entropi (*between and within group*). Angka Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Jika mendekati angka 0 bisa diartikan bahwa tidak ada ketimpangan pendidikan sementara jika nilai indeks 1 atau mendekati 1 bisa dikatakan terjadi ketimpangan pendidikan yang tinggi di negara tersebut, sedangkan indeks entropi digunakan untuk melihat ada/tidak ketimpangan dalam kelompok-kelompok yang digunakan (desa-kota dan pada laki-laki vs perempuan). Hasil perhitungan indeks ini di beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Ketimpangan Pendidikan di Beberapa Negara

No.	Nama Negara	Tahun Survei	Indeks Gini	Indeks Entropi
1.	Indonesia	2002	0,32	0,29
2.	Cina	2000	0,35	0,37
3.	Mesir	2000	0,51	0,90
4.	Jepang	2000	0,17	0,08
5.	Venezuela	2000	0,30	0,26

Sumber: Data dipilih dari WDR, 2006.

Meskipun tingkat ketimpangan pendidikan di Indonesia yang diukur oleh *World Bank* ada pada tingkat moderat, namun ketimpangan dari aspek lokasi diperoleh lebih besar dari aspek gender. Artinya, kondisi pendidikan kota-desa belum sepenuhnya selaras dimana kemajuan pendidikan relatif bertumpu pada wilayah perkotaan sedangkan ditinjau dari aspek gender diperkirakan lebih merata dimana laki-laki dan perempuan punya tingkat aksesibilitas yang relatif sama terhadap pendidikan. Jika dibandingkan dengan Jepang, ketimpangan pendidikan kita menjadi jauh lebih besar. Dari survei yang dilakukan pada tahun 2002 penduduk Jepang yang mencapai pendidikan 7-12 tahun porsinya mencapai 53% sementara yang berpendidikan 13+ mencapai 36%. Dari berbagai data yang diperoleh terlihat adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan sebuah negara.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah tingkat pendidikan membentuk kesejahteraan sebuah negara atau justru kesejahteraan membuat tingkat pendidikan menjadi lebih baik. Dengan identifikasi yang cermat akan diperoleh arah kebijakan yang tepat sehingga bisa diprioritaskan apakah mendahulukan kesejahteraan (pendapatan) atau membangun sistem pendidikan.

6.2. *Link and Match*

Pembangunan kuantitas pendidikan di Indonesia telah berjalan cukup lama. Tidak heran jika jumlah sekolah mengalami penambahan yang signifikan saat ini jika dibandingkan dengan era 80-an. Dalam 10 tahun terakhir, penduduk berusia 7 hingga 12 tahun hampir seluruhnya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dengan tren semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang mencanangkan pendidikan wajib dasar bagi penduduk Indonesia. Lebih dari 90 % penduduk usia 10 tahun ke atas, hingga tahun 2004 dinyatakan terbebas dari buta huruf. Pencapaian indikator di atas memang cukup menggembirakan. Hanya saja, jika dilihat dari struktur geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki daerah terpencil yang cukup luas, angka pencapaian di atas bisa meragukan mengingat sistem pendataan yang banyak menghadapi kendala (termasuk aksesibilitas ke daerah terpencil).

Terlepas dari masalah kevalidan data, indikator pendidikan Indonesia secara kuantitatif membaik dari waktu ke waktu. Duflo (2001) melakukan penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa program pembangunan sekolah

dalam skala besar pada tahun 1973 dan 1980 banyak memberi kontribusi terhadap akses penduduk terhadap sekolah. Program tersebut bisa mencapai 1 sekolah banding 500 anak dengan tambahan masa pendidikan sekitar 2 hingga 4 tahun. Artinya, jika semula tingkat pendidikan hanya sampai sekolah dasar tetapi dengan intervensi pembangunan fisik, penduduk bisa melanjutkan hingga SMP atau SLTA. Pada tahun 2004, BPS (Statistik Indonesia 2005) mencatat masih ada 8,98% penduduk usia sekolah yang tidak sekolah.

Ada indikasi, keberhasilan program Keluarga Berencana juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk yang bisa memasuki sekolah. Semakin kecil jumlah anak, kesempatan untuk sekolah menjadi lebih besar karena bisa memperbesar porsi anggaran pendidikan dalam keluarga. Konsekuensi jangka panjang, program ekspansi konstruksi fisik sekolah tidak akan terlalu efektif bahkan akan banyak sekolah-sekolah dasar yang kekurangan pelajar jika tidak dibarengi pembangunan kualitas dan pemerataan dalam distribusi pendidikan. Komposisi penduduk Indonesia menurut pencapaian pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Kondisi Pendidikan Penduduk Indonesia (%), 1994 dan 2004

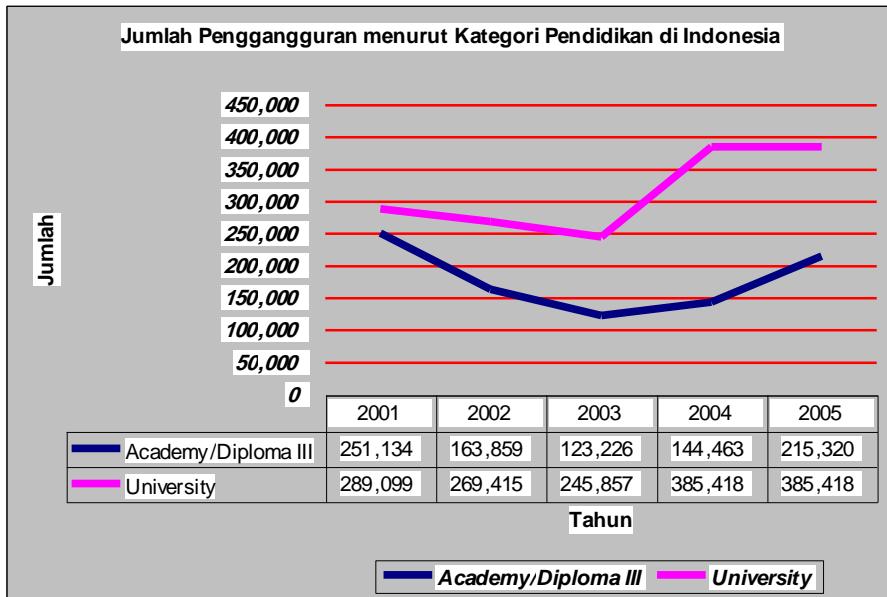
Indikator	1994	2004
Pendaftaran sekolah (%)		
	Penduduk usia 7-12 tahun	94,06
	Penduduk usia 13-15 tahun	72,38
Pencapaian pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas	Penduduk usia 16-18 tahun	45,31
	Tidak sekolah	11,73
	Some Elementary School	30,32
	SD	31,97
	SMP	12,16
Proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang mampu berbahasa Indonesia	SLTA	13,83
		23,72
		na
Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa baca tulis	86,41	87,26
Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa baca tulis	91,47	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Saat ini pembangunan pendidikan di Indonesia masih belum merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang baik masih terpusat di Pulau Jawa. Dari data *World Development Report* 2006, pada tahun survei 2002 persentase penduduk yang terdaftar pada pendidikan ≥ 13 tahun (pendidikan tinggi) sudah mencapai 0,07. Artinya, pendidikan tinggi sudah dinikmati 7% persen penduduk Indonesia. Bandingkan dengan Cina yang baru 5% penduduknya menikmati pendidikan tinggi (universitas) namun mengalami pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia. Di Australia, survei yang dilakukan pada tahun 1994 menunjukkan tidak ada lagi penduduk yang tidak sekolah. Bahkan seluruh penduduk sudah menikmati pendidikan 7 hingga bahkan lebih dari 13 tahun. Hal senada juga terjadi di negara-negara maju lainnya seperti Canada, Finlandia. Kecenderungan tingkat pendidikan tinggi juga terjadi di negara-negara sosialis seperti Rumania dan Hongaria.

Eksansi pembangunan sekolah mestinya dilakukan tidak hanya dari pembangunan fisik namun juga harus disinergikan dengan pembangunan kualitas. Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas adalah kemampuan institusi membentuk tenaga kerja siap pakai atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk mencapai itu, jenjang pendidikan yang terbesar diakomodasi adalah pendidikan keterampilan yang bisa membentuk *entrepreneur* yang kreatif. Pengembangan aspek kuantitatif semata akan selalu menambah jumlah pencari kerja dan pengangguran baru.

Tahun 2000-an jumlah pengangguran di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan kategori pendidikan, pertumbuhan pengangguran dari periode 2001 hingga 2005 mencapai 86,04 persen. Porsi pengangguran terbesar dialami oleh penduduk berpendidikan SMP. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan, jumlah pengangguran intelektual dengan pendidikan universitas juga terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan lonjakan yang cukup pesat. Untuk yang berpendidikan diploma atau akademi dalam dua tahun terakhir juga mengalami peningkatan setelah pada periode 2001-2003 mengalami penurunan. Perkembangan pengangguran berdasarkan kategori pendidikan (diploma/akademi dan universitas) bisa dilihat pada gambar berikut



Sumber: Statistik Indonesia, 2005, diolah.

Gambar 1: Jumlah Pengangguran menurut Kategori Pendidikan di Indonesia

Periode 2001-2005 ditandai dengan jumlah pengangguran berpendidikan universitas meningkat 33,36%, sementara pengangguran berpendidikan diploma/akademi tumbuh 49,05% pada periode 2004-2005. Peningkatan pengangguran berpendidikan diploma/akademi memprihatinkan setelah pada periode 2001-2003 mengalami penurunan yang signifikan. Percepatan orang memilih jenjang pendidikan ini tidak dibarengi dengan percepatan pertumbuhan lapangan kerja sehingga menimbulkan masalah pengangguran. Fenomena ini juga menunjukkan ketidaksiapan sekelompok penduduk berpendidikan tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja yang disebabkan tingkat mutu yang belum kompetitif.

Permasalahan di atas juga mengindikasikan belum ada *link* dan *match* antara pembangunan pendidikan dengan pasar tenaga kerja. Peningkatan jumlah orang yang siap memasuki dunia pekerjaan tidak diimbangi dengan

permintaan pada pasar tenaga kerja. Sisi penawaran (*supply-side*) yang terus mendesak memasuki pasar tenaga kerja bisa memberi dampak buruk. Salah satunya adalah persaingan. Persaingan yang sehat di satu sisi memberi dampak baik pada pencari kerja yakni upaya ekstra meningkatkan kualitas kerja namun di sisi lain bisa memperpanjang masa penantian (*gestation period*) untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dampak buruknya bisa juga berupa munculnya percaloan dalam memasuki lapangan pekerjaan serta meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya, dampak buruk ini akan menimbulkan *moral hazard* dalam perekonomian. Pengangguran bahkan bisa menggerogoti surplus perekonomian. Banyaknya pengangguran intelektual juga bisa berakibat pada tingkat upah yang rendah karena sebagian orang rela menerima upah yang rendah (di bawah kapasitasnya) asal memiliki pekerjaan.

Tingkat upah di Indonesia relatif rendah. Penentuan upah minimum regional yang diwujudkan dalam upah minimum propinsi (UMP) belum sepenuhnya mengangkat kesejahteraan. Besarnya upah yang dibawa pulang (*take home pay*) biasanya tidak jauh dari UMP sehingga kehidupan masyarakat masih pas-pasan. Perkembangan upah manufaktur rata-rata menurut wilayah dapat dilihat pada tabel 4

Dari Statistik Indonesia oleh BPS menunjukkan tingkat upah mingguan sektor manufaktur tertinggi saat ini ada di Sumatera dan Kalimantan dengan ketimpangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jogjakarta dan Jawa Tengah. Tingkat upah yang tertinggi ada pada sektor pertambangan, sementara upah terendah ada pada sektor manufaktur. Padahal, sektor manufaktur berkembang pesat di Jawa dengan kesediaan tenaga kerja yang sangat besar. Jumlah angkatan kerja yang terlalu besar menyebabkan tingkat upah yang relatif rendah. Pengangguran terdidik yang jumlahnya besar banyak yang sulit memasuki dunia kerja karena seringkali pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selama ini, tenaga kerja paling banyak diserap oleh sektor pertanian dan perdagangan. Porsi kedua sektor ini mencapai 63,94 persen pada tahun 2005.

Tabel 4
Besarnya Upah Rata-rata per Minggu dan Pertumbuhannya pada Industri Manufaktur di Wilayah Indonesia (Ribu rupiah), 1998-2000

Wilayah	Bulan Juni			Pertumbuhan (%)
	1998	1999	2000	
Sumatera Utara	53.8	68.1	85.2	58.36
Sumatera kecuali Sumatera Utara	86.2	103.2	119	37.94
DKI	62.1	93.6	112	79.55
Jawa Barat	62.8	84.2	99.3	58.12
Botabek	67.2	93.8	109	61.46
Jawa Barat tanpa Botabek	57.1	73.9	90.2	57.97
Jawa Tengah dan DIY	38.9	48.8	62	59.38
Jawa Timur	48.8	64.7	73.5	50.61
Sugresid	55.7	76.2	89.8	61.22
Jawa Timur tanpa Sugresid	42.1	57.6	62.3	47.98
Bali	43.6	59.4	60.1	37.84
Kalimantan	74.4	110.6	127	70.30
Sulawesi	80.1	106.5	58.1	-27.47
Indonesia	56.6	75.4	88	55.48

Sumber: Statistik Indonesia, 2005, diolah.

Tabel 5
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Utama,
Tahun 2001 dan 2005**

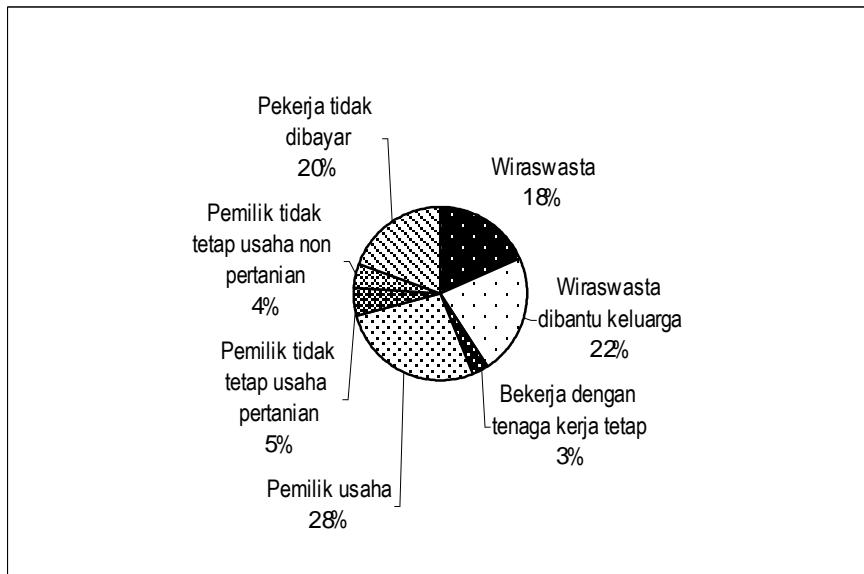
No.	Main Industry	Tahun 2001		Tahun 2005	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Pertanian	39,743,908	43.77	41,814,197	44.04
2	Pertambangan	-	na	808,842	0.85
3	Industri Manufaktur	12,086,122	13.31	11,652,406	12.27
4	Listrik, Gas dan Air	-	na	186,801	0.20
5	Konstruksi	3,837,554	4.23	4,417,087	4.65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,469,129	19.24	18,896,902	19.90
7	Transportasi dan Komunikasi	4,448,279	4.90	5,552,525	5.85
8	Lembaga Keuangan, Asuransi, <i>Real Estate</i> dan Jasa	1,127,823	1.24	1,042,786	1.10
9	Sosial Kemasyarakatan dan Jasa Pribadi	11,003,482	12.12	10,576,572	11.14
10	Lainnya	1,091,120	1.20	-	na
	Total	90,807,417	100.00	94,948,118	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Melihat dari kondisi perekonomian Indonesia, seharusnya dilakukan penyesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan pengembangan pendidikan. Bentuk penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan pembenahan kurikulum atau peningkatan kualitas pengajar, yang tidak hanya membebani dari sisi teoritis juga penguatan sisi empiris (praktek).

Kebesaran Negara Indonesia sebagai negara agraris seharusnya diselaraskan dengan pengembangan pendidikan yang siap di sektor tersebut sehingga bisa memajukan pertanian di Indonesia. Saat ini, justru upah yang terendah berada pada sektor pertanian. Dampaknya, banyak tenaga kerja terdidik tidak bersedia masuk ke sektor tersebut.

Pada saat tenaga kerja tidak dapat diserap sepenuhnya oleh pasar tenaga kerja yang terjadi adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Dari hasil angka statistik menunjukkan adanya kenderungan tenaga kerja menjadi *entrepreneur*. Ini bisa dilihat dari komposisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2005 pada gambar berikut.



Sumber data: Statistik Indonesia 2005, BPS, diolah.

Gambar 2 : Status Tenaga Kerja di Indonesia, Tahun 2005

Melihat dari komposisi di atas, diperlukan sistem pendidikan Indonesia yang bisa memperkuat *entrepreneurship* (kewirausahaan) di masa yang akan datang. Kesiapan yang diperoleh dari bangku sekolah akan mempertangguh dunia usaha dengan meminimalkan kesalahan. Dengan begitu pengelolaan usaha bisa dilakukan secara optimal. Jika tidak ada *link and match* antara dunia kerja dan pendidikan formal, bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada institusi pendidikan. Bentuk ketidakpercayaan tersebut bisa berwujud adanya pandangan “sekolah tidak sekolah sama saja”

karena tidak memberi tambahan signifikan bagi ketangguhan calon tenaga kerja untuk memasuki lapangan pekerjaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan harus selaras antara aspek kuantitas dan kualitas kemudian terkait dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Perhatian yang lebih ekstra seharusnya diberikan pada pendidikan dasar mengingat porsi pendidikan ini sangat menentukan perjalanan siswa pada etape di jenjang berikutnya hingga memasuki pasar tenaga kerja.

7. Kesimpulan Dan Saran

Dari uraian di muka disusun kesimpulan berikut.

1. Pembangunan pendidikan Indonesia seharusnya memiliki dimensi pembangunan jangka panjang sehingga pembangunan aspek kuantitas harus selalu dibarengi dengan pembangunan kualitas dengan memperhatikan apakah hasil dari pendidikan mempunyai keterkaitan terhadap dunia kerja.
2. Pembangunan pendidikan yang tidak diselaraskan dengan pasar tenaga kerja bisa memperburuk kesejahteraan, bisa berupa gaji di bawah standar kemampuan, dan meningkatkan jumlah pengangguran.
3. Ketimpangan pendidikan harus diminimalkan khususnya kesenjangan pendidikan kota-desa. Aksesibilitas desa terhadap pendidikan dan pelayanannya masih harus ditingkatkan
4. Sistem pendidikan yang tepat bisa menghasilkan *entrepreneurship* yang kompetitif dan kreatif sehingga memunculkan lapangan pekerjaan baru. Untuk itu seharusnya tingkat pendidikan didominasi oleh pendidikan keterampilan.
5. Peningkatan jumlah pengangguran terdidik (intelektual) harus mendapat perhatian lebih karena mengindikasikan belum adanya *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Berbagai aspek harus ditinjau kembali seperti kurikulum, kualitas pengajar bahkan pergeseran sistem pendidikan yang tidak semata-mata melihat dari aspek kuantitatif

8. Rekomendasi

Dari uraian di muka serta kesimpulan di atas maka disusun rekomendasi berikut.

1. Melakukan studi identifikasi terhadap sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja---untuk menjembatani *demand-side* dan *supply-side*.
 2. Melakukan analisis kausalitas antara ketersediaan tenaga kerja vs lapangan pekerjaan. Dengan begitu pemerintah memiliki strategi jangka pendek guna membuat skala prioritas.
 3. Optimalisasi fungsi kelembagaan pada institusi pendidikan sehingga bisa melakukan *link and match* antara muatan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Institusi pendidikan (khususnya pendidikan tinggi) harus melakukan R & D untuk menyikapi kebutuhan pasar (*demand-side* dan *supply-side*).
-

DAFTAR PUSTAKA

- Deon, Filmer. 2004."If you Build It, Will They Come? School Availability and School Enrollment in 21 Poor Countries", World Bank Policy Research Working Paper 3340. The World Bank.
- Gerald, Meier M. 2000. *Leading Issues in Economic Development*. Seventh Edition, Oxford University Press.Inc.
- Harry, Patrinos Anthony and Chris Saklariou, 2004. "Schooling and Labor Market Impacts of a Natural Policy Experiment", World Bank Policy Research Working Paper XXXX, The World Bank.
- Michael, Todaro P. and Stephen C. Smith. 2004. *Economic Development*. Eight Edition.
- P, Duraisamy. et.al. 1997. "Is There a Quantity-Quality Tradeoff as Enrollments Increase? Evidence from Tamil Nadu, India", Policy Research Working Paper 1768, World Bank.

Richard, Pomfret.1997. *Development Economics*. Second Edition. Prentice Hall.

Shoshana, Neuman and Adrian Ziderman, 1991. "Vocational Schooling, Occupational Matching, and Labor Market Earnings in Israel", Policy, Research, and External Affairs Working Papers Education and Employment 0683, World Bank.

Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik

World Development Report 2006, The World Bank